



Membangun kembali daerah bencana menjadi lebih baik, aman dan berkelanjutan.

Memelihara Komitmen untuk Mencapai Target SDGs

Pemerintah memiliki komitmen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tahun 2030 dimana salah satunya terkait dengan pemenuhan hunian layak yang didukung infrastruktur dasar permukiman seperti air minum dan sanitasi. Komitmen ini tidak hanya milik pemerintah pusat, namun juga harus diturunkan sampai level pemerintah daerah bahkan masyarakat.

Bila ingin tegap melanjutkan ke jenjang tangga pembanguan ekonomi selanjutnya, tidak ada pilihan lain bagi negara ini selain harus menuntaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pembangunan PKP memang masih relatif ketinggalan dibanding dengan pendidikan dan kesehatan meskipun ketiganya sama-sama dimandatkan dalam konstitusi kita. Kota yang layak dan berkelanjutan tidak akan tercapai bila masih

memiliki persoalan besar di sektor perumahan, air minum dan sanitasi.

Data yang ada menunjukkan kota-kota di Indonesia cukup ketinggalan dibanding dengan kota-kota di negara

lain.

Di tahun politik yang cukup menguras perhatian publik ini, kita berharap agar pembangunan PKP tidak ketinggalan untuk disuarakan diantara gegap gempitanya “perebutan kekuasaan”. Suaranya harus nyaring memasuki ruang-ruang kampanye karena dari situlah awalnya isu PKP ini akan menembus proses legislasi, perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah. Mengingat pentingnya isu PKP bagi masyarakat majalah PERCIK edisi 2018 ini menjadikannya sebagai pembahasan di laporan utama.

Selain rubrik laporan utama, PERCIK kali ini juga mengangkat sejumlah pembahasan menarik. Mulai dari keberpihakan Kabupaten Probolinggo untuk membenahi permukiman kumuh di daerahnya, hingga sejumlah inovasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah yang berkontribusi pada peningkatan akses universal.

Di kalangan masyarakat misalnya ada Insiatif Cleanomic yang berusaha menjadikan sampah menjadi barang berharga yang bernilai ekonomi. Seperti biasa kami juga menulis tentang berbagai agenda terkait pembangunan PKP yang dilakukan pemerintah.

Kami berharap sajian PERCIK edisi 2018 ini menjadi bacaan menarik dan inspiratif bagi kita semua.

Selamat Membaca!



TIM REDAKSI

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional

Pendiri:

Oswar Mungkasa

Pengarah:

Deputi Bidang Pengembangan Regional BAPPENAS

Pembina:

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penanggung Jawab:

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS

Pemimpin Redaksi:

Nurul Wajah Mujahid

Redaktur Pelaksana:

Laisa Wahanuddin, Tirta Sutedjo

Editor:

Aldy Mardikanto, Ira Lubis, Nur Aisyah Nasution

Tim Penyusun:

Rima Nadhira, Islahuddin, Cheerli

Desain:

Chaerul Arif, Hengki

Sirkulasi/Sekretariat:

Coursalina

DAFTAR ISI



7

LAPORAN UTAMA

Pemimpin Harus Mendengar Kebutuhan Dasar Warganya



16

LAPORAN UTAMA

Politisi Dituntut Cerdas Kemas Isu Perumahan dan Kawasan Permukiman

22

LAPORAN KHUSUS

Ribuan Rumah Tak Layak Huni Direnovasi di Probolinggo



LAPORAN KHUSUS

Optimis Mengejar Ketertinggalan

26

WAWANCARA

Pemimpin Harus Wariskan Mata Air, Bukan Air Mata

28





**Kelompok Kerja
Perumahan, Permukiman,
Air Minum, dan Sanitasi**

POKJA PPAS

adalah wadah lintas kementerian yang bertugas mengkoordinasikan arah dan kebijakan pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi.

Percik

Alamat Redaksi Majalah Percik :
Jl. Lembang No.35, Menteng,
Jakarta Pusat 10310

Telp/Fax : 021-31904113,
Situs Web : <http://www.ampl.or.id>,
Email: pokja@ampl.or.id

Redaksi menerima kiriman tulisan/
artikel dari luar. Isi berkaitan dengan air
minum dan sanitasi



34

OPINI

Mengurai Masalah
Air Minum di RUU SDA



38

TEKNOLOGI

Dalam 30 menit, IPLT Duri
Kosambi Sulap Limbah
Menjadi Air Siap Pakai

SERBA-SERBI

42 Berbagai Cara Masyarakat
Belanja Air Untuk Kebutuhan

INTERNASIONAL

50 Cukup dengan Sampah Siswa
Bisa Sekolah dan Kursus Bahasa
Inggris

KILAS

57 Penguatan Pokja Provinsi
Berbagi Informasi
Pembangunan Sanitasi

58 IDF Dukung Program
Pembangunan Indonesia Dari
Pinggir

Bappenas: Hunian Layak
Merupakan Hak Konstitusi
Warga

RESENSI

59 Membangun Kota, Membangun
Peradaban

TEROPONG

Ancaman Tinja
Mengintai Kota

46

INOVASI

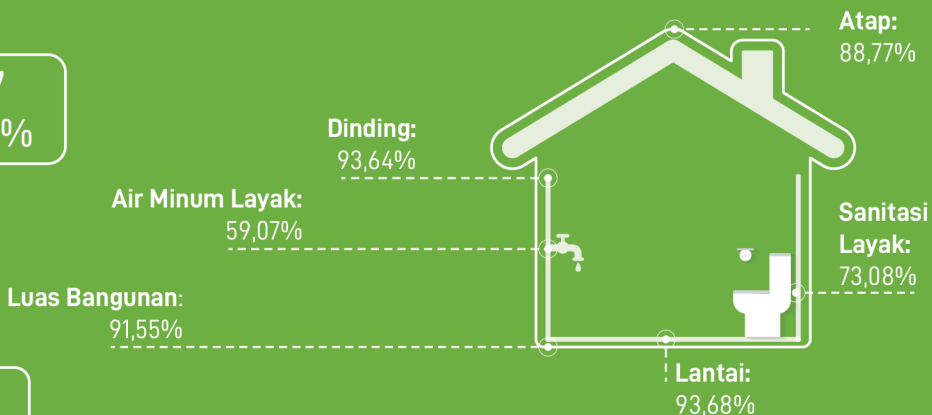
Cleanomic Perangi
Sampah Plastik
dengan Cara Unik

54



Capaian Rumah Layak Huni

2017
36,58%



2030
(target)
100%

Sampah Domestik di Perkotaan



Air Limbah Domestik

Kategori	Kondisi 2017	Target 2019
Akses Aman	0%	7,39%
Akses Layak	85%	60,15%
Akses Dasar	15%	9,37%
Tanpa Akses	0%	23,09%

Sumber: BPS Kor Susenas, 2017





Salah Satu Sudut Kota Bandung
Foto: geografiupi2010_blogspot2

PEMIMPIN HARUS MENDENGAR KEBUTUHAN DASAR WARGANYA

Tahun politik di depan mata, tetapi suara-suara pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) masih tak terdengar di tengah kemeriahan kampanye yang disampaikan para politisi dan partai politik.

Belum terdengarnya isu PKP ini sangat disayangkan, mengingat Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019 yaitu memenuhi 100% akses air minum dan sanitasi layak untuk seluruh masyarakat, serta meniadakan kawasan kumuh.

Selain itu, pada tahun 2030, Indonesia juga telah sepakat untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kedua target besar ini tentu membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk para politisi.

Kenapa politisi? karena mereka mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda pembangunan, mereka juga yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis di legislatif dan eksekutif. Dengan itu, sudah selayaknya para politisi ikut menyuarakan pentingnya pembangunan PKP, khususnya perumahan, air minum dan sanitasi.

Pada dasarnya banyak masyarakat yang tertarik dengan isu ini karena menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka. Perlu diyakini bahwa jika politisi bisa mengemas isu ini dengan baik, maka mereka bisa memperoleh keuntungan elektoral, hal ini dibuktikan oleh sejumlah politisi yang sudah berhasil menang di Pilkada setelah mengusung isu pembangunan PKP dengan baik.

Di Jakarta misalnya ada Anies Baswedan yang saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk menata kota seperti yang dijanjikannya saat kampanye.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program *Community Action Plan* (CAP) untuk menata 20 kampung kumuh di ibukota. Adapun lokasi yang menjadi sasaran CAP ini adalah Kota Bambu Utara, Kebon Jeruk, Kedaung Kali Angke, Pinangsia, Kapuk, Galur, Penjaringan,

“

Bagi masyarakat Lombok Timur, air lebih dibutuhkan dari beras. Karena air memang merupakan kebutuhan paling pokok dan sulit didapat di daerah ini.

Kalibaru, Tugu Utara, Ancol, Pluit, Duri Pulo, Tegal Parang, Kramat Pela, Bukit Duri, Cakung, Kampung Melayu, Klender, Pisangan Timur, dan Cipinang Besar Utara.

Sementara itu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ada Sukiman Azmi yang pada Pilkada 2018 mengusung isu peningkatan akses air minum sebagai salah satu isu utama di daerahnya. Ia melihat, banyak kecamatan di wilayahnya yang mengalami kesulitan, terutama



FOTO: KAMPUNGKOTA.NET/TUBAGUS RACHMAT

Peluncuran persiapan program *Community Action Plan* (CAP) di DKI Jakarta.

di musim kemarau. Sehingga warga bergantung pada pasokan air dari tangki yang dikelola dan didistribusikan oleh pihak swasta. Akibatnya warga harus membayar lebih besar guna mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Sukiman saat kampanye menjanjikan bahwa pemerintah Lombok Timur akan memasok air kepada masyarakat melalui tangki air. Biayanya pun ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan air mereka.

“Kami akan mengalirkan air ke tempat-tempat yang lebih tinggi untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui pipa-pipa yang akan dibangun oleh pemerintah,” ujar Sukiman mengulangi janjinya di acara haul yang digelar Pondok Pesantren Qudwatush Shalihin,



FOTO: POKJA AMPLI NASIONAL

Illustrasi orang sedang mengambil air.

Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Senin (24/9/2018), seminggu sebelum ia dilantik menjadi Bupati Lombok Timur.

“Bagi masyarakat Lombok Timur, air lebih dibutuhkan daripada beras. Karena air memang

merupakan kebutuhan paling pokok dan sulit didapat di daerah ini,” tambahnya.

Masyarakat pun menyambut gembira janji ini. Kegembiraan ini misalnya disampaikan Rahman, seorang warga Desa



FOTO: SUARANTB.ID

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi dan Rumaksi saat berkampanye di Pilkada 2018

“ **Pemkab Tangerang tidak hanya akan membangun Sanitasi Sekolah, tapi juga membangun dan merehab gedung, serta menata lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang layak, nyaman dan ramah lingkungan.** ”

Jerowaru Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, yang yakin janji Sukiman ini akan meningkatkan akses mereka pada air minum.

“Sesuai dengan janjinya di Pilkada lalu, kami yakin Pak Sukiman Azmi akan segera merealisasikan pendistribusian air secara rutin ke Desa Jerowaru ini,” kata Abdul Rahman yang hadir dalam haul di Pondok Pesantren Qudwatush Shalihin,

Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Senin (24/9/2018) bersama ribuan jemaah lainnya.

Dalam Pilkada 2018 lalu, Sukiman dan pasangannya, Rumaksi berhasil mengguguli tiga pasangan lainnya yaitu Haerul Warisin-Mahsun Ridwainy, Ali Masadi-Putrawan Habibi, dan Syamsul Luthfi-H Najamuddin Moestopa.

Kesuksesan menjadi kepala daerah karena mengusung isu PKP bukan hanya terjadi di Lombok Timur, kondisi itu juga terlihat di Pilkada Kabupaten Tangerang. Dimana, Ahmad Zaki Iskandar kembali terpilih sebagai Bupati Tangerang dalam Pilkada serentak 2018 lalu.

Saat menjadi bupati di periode pertama, Zaki memang getol melakukan pembangunan akses air minum dan sanitasi dan terbukti berhasil. Hal ini juga yang menjadi andalannya untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya kembali pada Pilkada lalu.

Saat menyampaikan visi misinya pada 8 Mei 2018 lalu, Zaki dan pasangannya, Mad



FOTO: FOKIA AMPL NASIONAL

Masyarakat antri untuk mendapatkan air bersih.



Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar sedang sosialisasi program sanitasi sekolah.

Romli, menyebutkan bahwa ia mempunyai 15 program unggulan. Program-program itu merupakan kelanjutan dari 25 program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 yang sudah dilaksanakannya.

Salah satu program unggulannya adalah Sanitasi Sekolah yang dikenal dengan Sanisek. Program ini sudah dirintis Zaki pada periode pertama memimpin Kabupaten Tangerang. Pada periode kedua, program ini akan ditingkatkan.

“Di sini (sekolah) munculnya bibit-bibit yang berkualitas. Untuk itu, ke depan bukan hanya Sanitasi Sekolah yang dibangun, tapi juga akan bangun gedung, rehab gedung. Mulai rehab ringan hingga rehab berat, dan menata lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang layak, dan nyaman,” jelasnya.

Selain program Sanitasi Sekolah itu, Zaki juga memiliki program lain yang berkaitan dengan sanitasi. Diantaranya adalah peningkatan akses sanitasi pesantren, madrasah dan masjid atau mushola. Program ini dilakukan karena ajaran agama juga sangat memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan, sehingga meningkatkan akses sanitasi di berbagai tempat ibadah berarti juga menjalankan perintah agama itu sendiri.

“Kalau untuk sekarang yang sudah kita coba adalah sanitasi untuk pondok pesantren,” ujar Zaki usai dinyatakan menang oleh KUPD Kabupaten Tangerang pada Rabu (27/6/2018).

Zaki-Romli berhasil menang Pilkada dengan memperoleh suara 83,72 persen dari 941.804 suara sah. Mereka mengungguli kotak kosong yang meraih 16,28 persen. Kemudian, keduanya

dilantik pada 2018 lalu.

Program lain yang mereka janjikan pada Pilkada lalu adalah Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah, dan modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ini merupakan solusi bagi pengolahan sampah yang terus menumpuk dari tahun ke tahun. Apalagi Tangerang juga merupakan wilayah padat penduduk yang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta, yang jumlah penduduknya terus meningkat.

Peningkatan jumlah penduduk selalu berkorelasi dengan peningkatan jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan dari setiap rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian Zaki. Program unggulan lainnya yang terkait adalah pembangunan dan pengolahan air baku, serta pembangunan



Uu Ruzhanul Ulum kala masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

instalasi pengolahan air untuk peningkatan layanan air minum.

Selain itu, Zaki juga melakukan penanggulangan banjir, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA).

Setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pasangan ini semakin menunjukkan komitmennya untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Salah satunya, meminta pelaku industri di wilayahnya untuk tidak mencemari lingkungan terutama sungai. Karena bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, sungai merupakan sumber kehidupan terutama saat musim kemarau.

“Perusahaan kalau mau usaha di

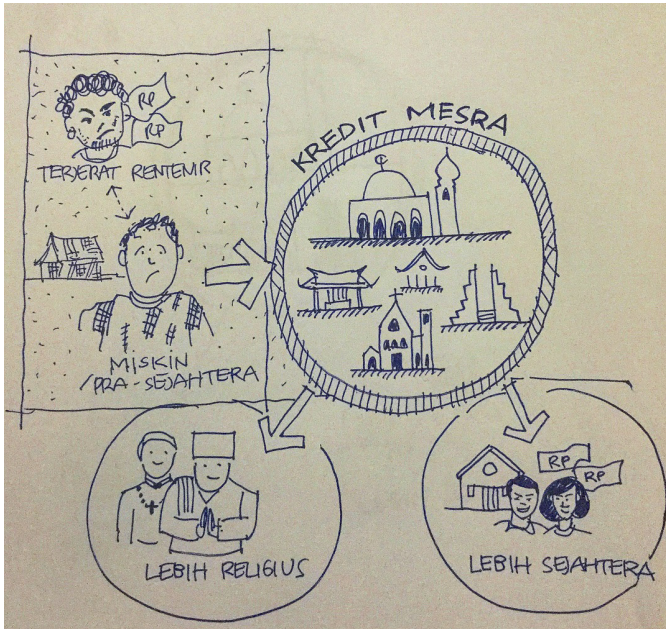
“ **Buat apa kita mempunyai televisi atau handphone bagus kalau tidak ada air di rumah. Ketiadaan air akan membuat orang tidak bisa buang hajat, atau mengolah makanan.**

sini jangan sampai melakukan pencemaran lingkungan, terutama membuang sampah ke sungai yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujar Mad Romli, Senin (17/9/2018).

Baginya, pemerintah dan pengusaha merupakan mitra kerja yang dapat bekerja sama untuk dapat memajukan daerah. Semua pihak harus menjaga daerah dari pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Hal ini merupakan pekerjaan berat tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Antara pengusaha dan penguasa harus sinergi, jadi bagaimana pemerintah menyediakan kemudahan investasi bagi pengusaha. Sementara pengusaha menjaga lingkungan sekitar pabrik, karena kalau masyarakat dirugikan imbasnya ke pemerintah daerah juga,” ucapnya.

“Jadi pabrik kalau mau buang limbah itu jangan di sungai, apalagi yang bisa mencemari sungai, karena masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat beraktivitas,” tambah Mad Romli.



Program-program yang dijanjikan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Saat Kampanye.

PKP di Program Jabar Juara

Pasangan lain yang meraup popularitas dan berhasil menang di Pilkada dengan mengandalkan isu PKP adalah Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Pasangan yang merupakan perpaduan antara mantan Walikota dan Bupati ini sejak awal memang menyadari bahwa akses air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan utama yang harus mereka penuhi saat menjadi pemimpin Jawa Barat.

Uu menyebut bahwa orang sering tidak mensyukuri akses pada air minum karena selama ini dimanjakan dengan air yang berlimpah. Padahal, sebanyak apapun air, tetap perlu dipelihara dan dilestarikan. Makanya, Uu menekankan perlunya menjaga kelestarian air di daerah yang memiliki sumber air berlimpah, dan di sisi lainnya,

mengusahakan ketersediaan air di daerah yang selama ini sering mengalami kekeringan.

“Antara air dan bensin, tentu lebih dibutuhkan air. Namun kadang orang merasa bensin lebih penting karena jumlahnya lebih sedikit dan biayanya mahal. Sehingga kadang orang tak memperhatikan untuk menjaga sumber air;” jelas Uu.

“Buat apa kita mempunyai televisi atau handphone bagus kalau tidak ada air di rumah. Ketiadaan air akan membuat orang tidak bisa buang hajat, atau mengolah makanan. Makanya, kami akan menginisiasi manajemen pembangunan akses air minum dan sanitasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan warga Jabar;” tambah Uu.

Guna memastikan ketersediaan

air bagi warga, Uu berjanji memperhatikan semua sungai yang mengalir di wilayah Jabar agar fungsinya semakin maksimal. Baik untuk mengairi sawah, bahan baku air, maupun untuk tempat rekreasi agar masyarakat semakin mencintai sungai.

Saat ini, hanya beberapa bulan setelah Ridwan-Uu dilantik menjadi pemimpin Jabar ada sejumlah program yang memang sudah akan mereka lakukan terkait air minum dan sanitasi. Mereka misalnya akan menyulap Sungai Citarum dan Kalimalang agar lebih indah. Hal ini bukan hanya untuk menimbulkan kecintaan pada sungai, namun agar sungai sesuai dengan fungsinya.

Ridwan Kamil, Sukiman Azmi dan Ahmad Zaki Iskandar terbukti berhasil membuat program-program air minum dan sanitasi sebagai senjata mereka untuk mendulang suara di Pilkada. Program-program mereka itu terbukti disambut baik oleh masyarakat yang mereka pimpin.

Keberhasilan para pemimpin ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi politisi lainnya untuk memberikan perhatian besar pada peningkatan akses air minum dan sanitasi. Apalagi Indonesia berkomitmen mencapai 100 persen akses rumah layak huni, 100 persen akses sanitasi layak, dan 100 persen air minum aman. Ini adalah hak dasar masyarakat dan menjadi amanat bagi setiap pemimpin di Indonesia.

Islahuddin



Dalam setiap keadaan, termasuk saat bencana datang, air selalu menjadi kebutuhan dasar yang selalu dicari warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Sebab tidak ada masakan yang bisa diolah tanpa air, pakaian pun tak bisa dicuci.

Maka, di kala bencana, saat pasokan air susah, warga selalu berusaha mencarinya pertama kali. Seperti korban bencana gempa di Lombok NTB yang rela antre untuk mendapatkan air, demi kebutuhan mereka



EMANGSAP
GEMPA
BUMI
←
5000

MANGO

Flower



Suasana kampanye damai sebelum Pilkada.



POLITISI DITUNTUT CERDAS KEMAS ISU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam berbagai perhelatan politik, calon kepala daerah dan partai politik banyak yang luput menyuguhkan isu Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang perumahan, air minum dan sanitasi.



Pelajar merupakan salah satu sasaran untuk kampanye hidup bersih sehat.

Foto: Istimewa

Pengamat lingkungan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menyebutkan, sedikitnya isu PKP dibicarakan karena banyak politisi yang kurang paham dan tidak bisa mengemas isu ini dengan baik. Padahal menurutnya, jika isu ini dikemas dengan baik akan mudah diterima masyarakat.

Di samping itu, menurut Eko, para politisi beranggapan bahwa sektor PKP belum menjadi perhatian masyarakat luas. Permasalahan air bersih, sampah, limbah, dianggap masih belum darurat.

“

Kualitas lingkungan sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Bahkan lingkungan adalah cerminan kualitas seseorang.

“Akhirnya mereka tak akan memakai isu ini untuk meraup suara calon pemilih,” buka Eko saat diwawancara PERCIK.

Eko menyebut kualitas lingkungan saat ini mengalami penurunan, dan akan berdampak pada kualitas hidup orang banyak. Bahkan ia mengatakan lingkungan adalah cerminan kualitas masyarakat. Memang masalah lingkungan sering tidak memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, namun dari lingkungan yang sehat lah semua bermula.

Lingkungan sehat akan



membuat masyarakat sehat dan bersemangat. Kondisi lingkungan yang sehat juga berkontribusi pada kesejahteraan mereka, karena bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Lingkungan sehat juga jelas akan menghindari mereka dari penyakit.

Namun sebagian masyarakat besar masih memandang bahwa masalah kesehatan yang paling penting adalah keberadaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan dokter. Pengobatan dianggap lebih penting dibanding pencegahan. Sehingga, mereka sering

menganggap kesehatan itu mahal, karena biaya pengobatan memang tidak sedikit.

Partai dan politisi menurut Eko juga belum banyak memikirkan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

“Kapabilitas partai politik juga belum bisa menjangkau ke sana. Jadi yang dipikirkan adalah suara dulu. Setelah memerintah dan mengetahui semua permasalahan yang ada, mereka baru memikirkan soal pembangunan berkelanjutan ini,” sambungnya.

Eko mengaku sangat menyayangkan kondisi tersebut, pasalnya masalah yang ada di sektor lingkungan bisa berakibat masalah lainnya di tengah masyarakat. Sebut saja masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial yang bisa langsung mengalami dampaknya, jika masyarakat tidak mampu mengakses air minum dan sanitasi yang layak. “Jika lingkungannya baik, kualitas sosialnya akan baik, dan tentu berdampak pada ekonomi yang baik pula. Saya melihat ada pola pikir yang terbalik di tengah masyarakat, dimana mereka melupakan sebab

“

Saya melihat ada pola pikir yang terbalik di tengah masyarakat. Mereka melupakan sebab dan mengedepankan akibat.”

dan mengedepankan akibat,” urutnya.

Menurut Eko, masalah lingkungan ini sudah menjadi pembahasan hangat di tingkat global. Banyak pihak yang mengkhawatirkan masalah lingkungan yang terus bertambah dan tidak mampu diselesaikan dan berakibat pada banyak hal.

la mencontohkan, di Indonesia masalah air minum dan sanitasi sebenarnya terus bertambah. Di DKI Jakarta misalnya, volume di sumber air terus berkurang, sementara kebutuhan air minum meningkat, serta jumlah penduduk dan permukiman terus bertambah.

Begitu juga dengan masalah sanitasi, dimana Jakarta menurutnya darurat limbah tinja, seiring semakin banyaknya penduduk dan jumlah permukiman. Selama ini masyarakat hanya membuat tangki septik tanpa mengurusnya dengan baik, misalnya tidak melakukan menyedot limbah tinja secara berkala.

“

Isu lingkungan ini belum menjadi isu bersama.

Sayangnya semua permasalahan ini belum disadari masyarakat dan juga para elit. Mereka sepertinya akan sadar jika bencana lingkungan itu benar-benar terjadi. “Intinya, isu lingkungan ini belum menjadi isu bersama,” katanya.

Bagi politisi yang cerdas, menurut Eko, mereka akan meyakinkan masyarakat bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian bersama. Sehingga mereka pun membuat program kongkrit untuk ikut menyelesaikan masalah lingkungan.

Berharap Kampanye Positif

Sementara itu pengamat politik dari Lingkaran Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti bahkan menyebutkan banyak politisi yang tidak menginventarisir berbagai isu yang mengangku hajat hidup masyarakat, diantaranya terkait sektor perumahan, air minum dan sanitasi.

Para politisi menurutnya juga banyak yang tak memiliki program jelas dan terperinci yang ditawarkan kepada masyarakat, sebagai solusi atas berbagai masalah yang ada. Mereka hanya sering menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, tanpa menggambarkan bagaimana mencapai janji tersebut.

Menurut Ray, ketiadaan program jelas yang ditawarkan para

politisi ini merupakan sebuah kerugian bagi calon pemilih, karena tidak bisa menilai apa yang akan mereka lakukan saat menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Ini merupakan kerugian kita. Karena membuat kita menjadi tidak jeli terhadap program yang ditawarkan, termasuk terhadap program kebutuhan harian seperti air bersih dan sanitasi,” kata Ray.

Malah banyak politisi yang hanya mengandalkan keturunan, politik dinasti, hingga isu-isu yang tidak substansial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berharap para politisi bisa menggali isu yang substansial dalam kampanye mereka. Sehingga Indonesia bisa mengatasi dan mengantisipasi sejumlah masalah lingkungan yang mungkin terjadi pada



ISTIMEWA

Deklarasi Kampanye Damai.



Deklarasi Kampanye Damai.

masa mendatang.

“Masalah lingkungan sebenarnya ada di dekat kita dan layak untuk dijadikan isu penting dalam perhelatan demokrasi. Sebut saja masalah sampah yang semakin menumpuk di dekat rumah kita.

“

Masalah lingkungan sebenarnya ada di dekat kita dan layak untuk dijadikan isu penting dalam perhelatan demokrasi. Sebut saja masalah sampah yang semakin menumpuk di dekat rumah kita.

Atau air dari sumur bor kita yang sering kotor atau mampet, belum lagi pasokan PDAM yang tidak merata setiap harinya, dan lain sebagainya,” jelas Ray.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komunikonten Indonesia, Hariqo Wibawa Satria juga mengakui saat ini para politisi umumnya tidak memberikan perhatian besar pada masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Mereka terjebak pada hasil pemberitaan media dan hasil survei yang selama ini tidak memunculkan isu-isu mendasar seperti masalah lingkungan dan air minum ini. Padahal, masalah ini mendapatkan perhatian besar di dunia internasional dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

la meminta para politisi untuk memberikan perhatian besar pada isu-isu mendasar ini,

karena masyarakat juga sudah cerdas untuk mengetahui calon pemimpin yang benar-benar mengetahui kebutuhan dasar mereka. Masyarakat juga akan memilih pemimpin yang berkualitas, memiliki visi-misi yang jelas, punya gagasan dan mempunyai *leadership* yang baik. Masyarakat juga bisa menilai mana politisi yang mempunyai program yang jelas, dan mana yang tidak.

Maka dari itu, ia meminta para politisi untuk menyajikan kampanye positif agar kualitas pemilu bisa lebih baik. Mereka harus meninggalkan kampanye-kampanye hitam dan jauh dari politik identitas.

“Saatnya menyajikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program terkait perumahan, air minum dan sanitasi,” kata Harico.

Islahuddin

RIBUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI DIRENOVASI DI PROBOLINGGO

Kemiskinan identik dengan ketidaklayakan rumah seperti tak layak huni, fasilitas air minum dan sanitasi yang tidak layak dan tidak aman. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai perhatian besar untuk memperbaiki kehidupan warganya agar keluar dari garis kemiskinan. Tidak hanya dari cara ekonomi, juga pelayanan dan sarana permukiman.



Ilustrasi pemukiman sehat

Foto: Istimewa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Jawa Timur memberikan perhatian besar pada rumah tak layak huni. Berbagai cara mereka lakukan, agar ribuan rumah tak layak huni yang ada di daerah tersebut bisa segera direnovasi, dengan harapan penghuninya bisa menjalani lebih hidup baik.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkab Probolinggo, Donny Adianto menyebut selama ini ia mempunyai program untuk merenovasi rumah tak layak huni. Program ini selain menggunakan anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pihaknya juga berkolaborasi dengan pemerintahan desa.

Menurut Donny, saat ini semua pemerintah desa sudah menyadari bahwa mereka perlu turun tangan untuk merenovasi rumah-rumah tak layak yang ada di wilayahnya. Apalagi saat ini pemerintah desa mempunyai dana yang bersumber dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya.

“Pada tahun pertama dan kedua, pemerintah desa umumnya menggunakan dana desa untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya. Setelah sejumlah fasilitas umum dibangun, aparat desa itu kemudian juga tertarik untuk menggunakan sebagian dana desa untuk memperbaiki rumah tak layak huni,” ujar Donny dalam wawancara dengan PERCIK.

Peran pemerintah desa ini semakin besar setelah ada



Renovasi jamban rumah penduduk di Probolinggo.

Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan Perbup ini, Pemda meminta pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa untuk pembangunan 5 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Plus jamban sehat setiap tahun. Pembangunan RTLH Plus ini tidak hanya memperbaiki kondisi rumah dan fasilitas sanitasinya, namun juga membuat biopori kecil yang berfungsi untuk menghindari halaman rumah mengalami becek.

Dengan setiap desa berkontribusi untuk melakukan renovasi rumah, maka akan ada ribuan rumah yang direnovasi setiap tahunnya. Ini tentu merupakan jumlah yang tidak sedikit dan mempunyai

peran yang signifikan untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat di Probolinggo.

“Di Kabupaten Probolinggo ada 325 desa. Jadi total minimal

1.625 ada rumah tidak layak huni yang direnovasi setiap tahunnya,” kata Donny.

Jumlah rumah yang direnovasi dari dana desa itu jauh lebih



Pembangunan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Probolinggo

besar dibanding yang bisa dilakukan pemkab dari APBD setiap tahunnya. Setiap tahun, Pemkab baru bisa merenovasi sekitar 500 rumah kurang layak huni.

Donny menyebutkan, setiap desa mengalokasikan Rp15 juta untuk merenovasi satu rumah. Berarti setiap tahun, pemerintah desa mengeluarkan dana Rp75 juta untuk merenovasi 5 rumah tak layak huni.

Jumlah dana renovasi per rumah yang dialokasikan pemerintah desa itu lebih besar dibanding yang dikeluarkan Pemkab Probolinggo yang sebesar Rp12,5 juta per rumah tak layak huni.

Kolaborasi Berbagai Pihak

Jumlah rumah tak layak huni yang direnovasi semakin bertambah seiring dengan adanya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan TNI.

Donny menyebut bahwa untuk

“ Di Kabupaten Probolinggo ada 325 desa. Jadi total minimal 1.625 ada rumah tidak layak huni yang direnovasi setiap tahunnya.

menambah jumlah rumah tak layak huni yang direnovasi setiap tahunnya, Pemkab Probolinggo mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaannya dilakukan TNI yang ikut membangun desa.

Sementara itu setiap perusahaan di Probolinggo melalui program CSR-nya setiap tahun juga berkomitmen merenovasi 5 rumah tak layak huni, namun perusahaan ada yang melakukan renovasi sampai 10 rumah setiap tahunnya.

Donny menyebut bahwa dalam empat tahun terakhir, forum CSR yang terdiri dari sejumlah perusahaan dan Pemkab Probolinggo aktif melakukan koordinasi dan kolaborasi.

“Saat ini ada nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan dan Pemkab Probolinggo untuk membangun lima rumah pertahun, dan MoU ini berlaku selama dua tahun. Sehingga masing-masing perusahaan minimal merenovasi 10 rumah,” kata Donny.

Sumbangan CSR, Pemerintah Provinsi dan TNI ini menambah jumlah rumah tak layak huni yang direnovasi di Probolinggo setiap tahunnya.

Menurut Donny, dengan kolaborasi berbagai sektor, permasalahan dapat diatasi lebih mudah dan keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi hambatan.



Mengentaskan Kemiskinan

Donny menyebut bahwa kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting tentang status seseorang, apakah ia masuk dalam kategori miskin atau tidak.

Merenovasi rumah tidak layak

huni menjadi layak huni bisa meningkatkan status seseorang. Status mereka bisa meningkat dari yang semula berada di bawah garis kemiskinan menjadi keluar dari garis kemiskinan, atau setidaknya mendekati mereka untuk segera keluar dari garis tersebut dan mengantarkan mereka pada

kehidupan yang lebih baik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang akan masuk dalam kategori miskin jika memenuhi setidaknya 9 dari 14 kriteria yaitu kondisi luas rumah, kondisi lantai tempat tinggal, dinding rumah, tersedianya fasilitas buang air besar, sumber

Optimis Mengejar Ketertinggalan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengakui bahwa mewujudkan target 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi atau yang dikenal dengan 100-0-100 memang bukanlah hal mudah. Namun bukan berarti hal itu tidak bisa tercapai.

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkab Probolinggo, Donny Adianto menyebut, berdasarkan data 2017, capaian akses air minum mencapai 78,39%, sementara akses sanitasi mencapai 57%.

Saat ini ada sejumlah peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dimiliki

Pemkab Probolinggo untuk mencapai akses universal. Perda itu adalah Perda penyertaan modal PDAM No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan daerah Kabupaten Probolinggo No. 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM, Perda Air Limbah Domestik, serta Perda Persampahan



IPLT Seroro Probolinggo

penerangan rumah, keberadaan sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, seberapa sering mengkonsumsi daging dan susu, kemampuan membeli pakaian baru setiap tahun, kemampuan makan setiap hari kesanggupan membayar biaya pengobatan, penghasilan, pendidikan, hingga jumlah tabungan.

“Dengan renovasi rumah setidaknya ada beberapa kriteria yang bisa diubah seperti kondisi dinding, lantai, jamban, hingga keberadaan sumber air menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan dengan sejumlah perubahan kategori ini, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” harap Donny.

Kebijakan yang dimiliki Pemkab Probolinggo ini membuktikan bahwa bahwa cara untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Diharapkan apa yang sudah mereka lakukan bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain.

Islahuddin

No. 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

“Juga ada Perbup No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi pendelegasian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan Dana Desa yang memandatorikan pembangunan 5 RTLH Plus Jamban sehat,” ujar Donny.

Untuk akses air minum, Donny yakin bisa mencapai 100% dalam dua tahun ke depan. Sementara akses sanitasi yang saat ini masih lebih kecil dibanding air minum, Donny yakin bisa mencapainya dalam 5 tahun ke depan.

Ia mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk meningkatkan akses sanitasi. Diantaranya adalah perilaku sebagian masyarakat yang sulit diarahkan untuk hidup lebih sehat. Sebagian dari mereka masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan melakukan kegiatan mandi cuci kakus (MCK) di sungai serta buang sampah sembarangan.



IPLT Serero Probolinggo

“Di sektor perumahan kendalanya masih ada sejumlah masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau keinginan untuk memiliki atau memprioritaskan rumah yang layak huni dan sehat,” kata Donny.

Beruntung saat ini, Pemkab Probolinggo mendapatkan bantuan sejumlah pihak untuk segera mencapai target akses universal ini. Diantaranya berkolaborasi dengan USAID - IUWASH PLUS dalam melakukan pemucuan, sosialisasi kepada masyarakat untuk perubahan perilaku.

Pemkab Probolinggo juga berusaha menggandeng pengembang perumahan untuk mewujudkan sistem perumahan, air minum dan sanitasi yang terintegrasi. Saat ini sedang disusun RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang didalamnya untuk mewujudkan Perda sebagai Payung Hukum yang berisikan kewajiban Pengembang Perumahan untuk membangun IPAL Kawasan sehingga 1 perumahan cukup membangun IPAL dengan Sistem off site dan pada akhirnya lari ke L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal).

Islahuddin



UU RUZHANUL ULUM, Wakil Gubernur Jawa Barat

Pemimpin Harus Wariskan Mata Air, Bukan Air Mata



Ridwan Kamil dan Uu Rizhanul Ulum merupakan pasangan yang menggunakan isu Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang meliputi air minum dan sanitasi sebagai salah satu andalan mereka saat maju dalam Pilkada Jawa Barat pada Juni 2018 lalu.



ISTIMEWA

ISTIMEWA

Menurut Uu, peningkatan akses air minum dan sanitasi masuk dalam program Gerbang Desa yang mereka tawarkan. Menurutnya, air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat selain sandang dan pangan. Makanya, ia sejak awal bercita-cita agar ketersediaan air bisa dinikmati masyarakat sepanjang tahun, termasuk saat musim hujan.

Begitu juga dengan masalah sanitasi, karena jika akses pada sanitasi ini tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Masalah lainnya tentu adalah banjir yang saat ini masih banyak terjadi di Jabar. Ia menyebut, banjir tidak bisa diselesaikan oleh satu bupati atau walikota, namun harus terintegrasi dengan daerah lain, sehingga peran Pemerintah Provinsi menjadi sentral untuk menyelesaikan masalah ini.

Berikut wawancara lengkap PERCIK dengan Uu Ruzhanul Ulum beberapa saat sebelum dia dilantik sebelum jadi Wakil Gubernur Jabar.

Kenapa masalah air minum dan sanitasi menjadi salah satu perhatian utama saat Anda bersama Ridwan Kamil maju di Pilkada Jabar?

Pemenuhan akses air minum dan sanitasi ini merupakan salah satu unggulan dalam program Gerbang Desa untuk Jabar. Program Gerbang Desa ini mencakup sejumlah hal mulai dari pembangunan jalan desa, listrik masuk desa, irigasi dan air bersih pedesaan yang di dalamnya termasuk masalah sanitasi.

Masalah sumber dan penyaluran air tidak hanya berguna untuk konsumsi masyarakat, namun juga untuk peningkatan hasil

“

Soal air bersih pedesaan, kami sempat berpikir, kenapa di saat kemarau, orang kampung selalu susah air. Padahal, tumbuh-tumbuhan, kebun, dan gunung ada di kampung.

pertanian. Makanya, kami juga memberikan perhatian pada masalah irigasi, karena banyak irigasi yang jebol, saluran air banyak yang rusak. Akhirnya, air sungai langsung ke laut, tidak ke sawah dulu.

Pembangunan irigasi dan air untuk konsumsi ini sudah kami lakukan saat memimpin Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode. Alhamdulillah hasil pertanian juga meningkat. Bahkan beras Tasikmalaya bisa ekspor beras ke lima benua.

Soal air bersih pedesaan, kami sempat berpikir, kenapa di saat kemarau, orang kampung

selalu susah air. Padahal, pohon, tumbuh-tumbuhan, kebun, dan gunung ada di kampung dan ini menyimpan sumber air.

Apa perkotaan dan pedesaan juga mengalami hal yang sama dalam hal pemenuhan air minum?

Masalah air di perkotaan relatif lebih baik dibanding pedesaan di Jabar karena air diurus dengan lebih baik. Sanitasinya juga bagus. Makanya saya berpikir, kenapa hal yang sama juga tidak terjadi di pedesaan, walaupun diakui masalah yang dihadapi kota dan desa memang tidak sama.





Uu Ruzhanul Ulum saat memantau lingkungan.

ISTIMEWA

Namun pada dasarnya, semua bisa diselesaikan. Hal ini saya buktikan saat memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Pada 2012 lalu, saya mengeluarkan SK No. 16 tahun 2012 yang memerintahkan kepada setiap kepala desa (Kades) untuk memelihara sumber mata air dan mencari sumber mata air baru.

Kenapa membuat kebijakan tersebut?

Sebagian besar desa sebenarnya memiliki sumber mata air, baik itu milik perorangan maupun milik desa. Namun sumber air itu ditutup saat warga saat membangun rumah, karena tidak ada lahan lagi. Sementara keperluan perumahan semakin meningkat.

Bahkan ada pohon besar yang

sebenarnya berfungsi sebagai pengumpul air terpaksa ditebang, dan kayunya dijual agar bisa menghasilkan uang. Padahal sebelumnya, pohon ini tidak mau ditebang, namun karena kebutuhan mendesak, akhirnya ditebang juga. Sehingga lambat laun sumber pengumpul air itu berkurang dan habis yang berakibat pada kecilnya sumber air di desa itu.

Dengan Perda No. 16 tahun 2012, Kades tidak hanya diperintahkan menjaga sumber mata air, namun juga disediakan dana agar sumber itu benar-benar bisa mereka jaga. Alhamdulillah menunjukkan hasil. Dimana sejak itu sumber air terjaga dan pengurangan debit air tidak terjadi seperti sebelumnya.

Kebijakan ini, memang tidak

sempurna. Namun setidaknya bisa memberikan solusi di tengah penurunan jumlah sumber air yang selama ini menjadi masalah di pedesaan.

Apakah kebijakan yang pernah dilakukan di Tasikmalaya akan diadopsi oleh Pemprov Jabar?

Tentu, sebab bukan hanya Tasikmalaya yang menghadapi masalah akses air minum. Setelah muter (keliling) selama kampanye saya mengetahui bahwa banyak daerah yang mengalami hal serupa, sebut saja Subang dan Cirebon dan daerah lainnya. Maka solusinya, cari dan pelihara mata air dan salurkan airnya kepada masyarakat.

Anggaran yang diperlukan sekitar Rp100 juta hingga Rp200



Deklarasi ODF di salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

juta untuk satu titik. Dana itu selain untuk memelihara sumber air, juga digunakan untuk membangun kamar mandi yang sudah ada penampungan air, jaringan perpipaan untuk disalurkan ke titik lain.

“

Kades tidak hanya diperintahkan menjaga sumber mata air, namun juga disediakan dana agar sumber itu benar-benar bisa mereka jaga. Alhamdulillah menunjukkan hasil.

Dana tersebut selain dipergunakan untuk memelihara sumber air, juga membangun WC dan infrastruktur sanitasi.

Penganggaran untuk air minum dan sanitasi sebesar Rp 200 juta itu sudah dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Bagi desa yang menerima bantuan ini selain wajib memelihara sumber-sumber air yang sudah ada, juga harus memiliki manajemen untuk mengelola dan memeliharanya.

Bisa diceritakan, Desa mana yang sudah merasakan manfaat dari kebijakan tersebut?

Salah satunya Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah desa mampu membeli lahan yang

memiliki sumber mata air. Lahan tersebut sempat mau dijual oleh pemiliknya, karena membutuhkan uang.

Beruntungnya, lahan ini tidak sampai terjual ke pihak swasta, sehingga pemerintah desa tetap bisa memanfaatkan sumber mata air yang ada.

Makanya saya akan meminta walikota dan bupati di Jabar untuk mencari sumber-sumber air dan menjaganya. Kebijakan seperti di Tasikmalaya ini skalanya bisa diperluas hingga tingkat provinsi.

Bagaimana meyakinkan bupati dan walikota untuk melakukan program yang diproyeksikan Pemerintah Provinsi?

Provinsi selain akan menyiapkan

“

Bagi saya, pemimpin itu harus mewariskan mata air kepada masyarakat, bukan air mata. Bagi saya, air merupakan denyut nadi kehidupan.

dana untuk menyukseskan kebijakan ini, juga akan menyiapkan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Hal yang sama juga dilakukan Kabupaten

Tasikmalaya yang menyiapkan Juklak-Juknis untuk setiap desa.

Jadi uang yang diberikan tidak dipakai begitu saja, tetapi ada arahan dan aturan yang harus ditaati.

Kenapa saat di tengah banyak calon kepala daerah yang jarang mengkampanyekan air minum dan sanitasi, Anda malah melakukannya?

Bagi saya, pemimpin itu harus mewariskan mata air kepada masyarakat, bukan air mata. Bagi saya, air merupakan denyut nadi kehidupan.

Saya juga terinspirasi oleh kakek saya, almarhum KH Choer Affandi, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Beliau saat mendirikan pesantren selalu memperhatikan air, kamar mandi, jamban, dan tempat

wudhu.

Masyarakat kadang kurang memperhatikan masalah air, karena selama ini kebutuhan atas air ini sudah terpenuhi. Atau merasa air itu pasti akan selalu ada, karena itu alamiah. Padahal sumber air bisa hilang, jika tidak memeliharanya.

Bahkan mungkin masyarakat lebih setuju bensin itu lebih penting daripada air, karena selama ini cenderung air gratis dan untuk dapat bensin membutuhkan uang untuk membeli.

Karena air dianggap gratis itulah, banyak orang tidak peduli untuk mengurusnya. Akhirnya, banyak daerah yang sumber airnya melimpah, sekarang mengalami kekurangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Islahuddin



Uu Ruzhanul Ulum bersama para santri.

ISTIMEWA

MENGURAI MASALAH AIR MINUM DI RUU SDA

Nur Aisyah Nasution

Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas

Dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara telah menjamin hak setiap orang terhadap air, namun pengelolaan air di Indonesia masih belum optimal terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Hal ini terbukti dimana baru 59% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak (BPS, 2018).

Saat ini legislatif sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air sebagai UU pengganti akibat dibatalkannya UU Sumber Daya Air Nomor 4 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 lalu. UU ini dibatalkan karena dinilai belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada

Naskah Akademis RUU SDA versi April 2018, materi pada RUU SDA disusun berdasarkan studi literatur dan juga analisis data sekunder seperti hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat air merupakan benda vital bagi sumber kehidupan, selayaknya penyusunan RUU SDA didasari oleh kajian yang lebih mendalam dan menggunakan metode yang lebih kuat serta menggunakan data primer sesuai dengan karakteristik Indonesia, yang kaya akan sumber daya air.

Pembuat kebijakan selayaknya dapat menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang sudah jamak diterapkan di negara-negara maju. Meskipun belum secara luas diterapkan di Indonesia, RIA

dinilai sebagai sebuah metode yang dapat menilai dampak positif dan negatif dari sebuah peraturan yang akan dibentuk yang berbasis bukti (*evidence-based*). Saat ini, beberapa negara berkembang seperti Meksiko dan Chili telah mengaplikasikan RIA karena metode tersebut dapat mendukung kapasitas pemerintah dalam membuat kebijakan yang efisien dan efektif.

Berbicara mengenai air yang merupakan materi utama yang akan diatur pada RUU SDA yang baru, tentu tidak terlepas dari isu besar kelangkaan air yang saat ini menjadi masalah global. Kelangkaan air merupakan isu yang melatarbelakangi pengakuan hak asasi manusia atas air. Pengakuan atas hak ini dicanangkan pertama kali pada Konferensi Internasional PBB di Mar de Plata, Argentina, pada



Masyarakat menggunakan sungai untuk berbagai keperluan.

1977.

Pada konferensi tersebut, telah disebutkan bahwa pengelolaan air limbah (sanitasi) merupakan salah satu aksi penting dalam pemanfaatan dan efisiensi air. Melihat kondisi di Indonesia, isu kelangkaan air yang terjadi juga tidak terlepas dari minimnya upaya Pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam sanitasi.

Hal ini terlihat baru 67% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak namun diperkirakan baru 2% limbah tinja yang terlayani tersebut yang diolah dengan baik (BPS, 2018). Namun demikian, dari

konsep RUU SDA yang disiapkan masih belum terlihat peranan penting sanitasi sebagai suatu upaya untuk mengelola SDA dengan baik.

Kelangkaan air dan pengakuan air sebagai hak asasi manusia juga menjadi salah satu hal utama yang mendasari dibatalkannya UU SDA Nomor 4 Tahun 2004, dimana UU tersebut dianggap memberi ruang yang terlalu besar bagi swasta untuk mengelola air sehingga menjadi pintu masuk bagi terjadinya privatisasi air. Pandangan tersebut menyiratkan bahwa air di Indonesia masih dianggap sebagai komoditas yang dilarang untuk diprivatisasi atau sepenuhnya dikelola oleh

swasta. Hal ini tentunya berbeda dengan pandangan-pandangan yang berkembang saat ini, utamanya di negara-negara maju, bahwa air sebenarnya adalah benda sosial sekaligus benda ekonomi.

Konsep air sebagai benda publik masih menjadi konsideran utama dalam perumusan RUU SDA terbaru. Hal ini seperti tersirat dalam RUU SDA versi September 2018. Namun setidaknya ada tiga hal yang perlu dikritisi terkait konsep air sebagai benda publik dibandingkan dengan sebagai benda ekonomi.

Pertama, dalam RUU itu disebutkan bahwa SDA



Mengumpulkan air untuk kebutuhan.

diprioritaskan bagi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Namun demikian, pada klausul prioritas pemberian izin penggunaan SDA, ditetapkan bahwa penggunaan air bagi pertanian lebih diprioritaskan dibanding penggunaan air bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Padahal di Indonesia, penyediaan air minum khususnya di perkotaan utamanya dilakukan oleh SPAM yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Dalam hal ini PDAM merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk memenuhi layanan dasar masyarakat akan air minum.

Saat ini, banyak PDAM di Indonesia yang telah mengalami kelangkaan sumber air baku. PDAM juga dibebani biaya

“

Kelangkaan air merupakan isu yang melatarbelakangi pengakuan hak asasi manusia atas air. Pengakuan atas hak ini dicanangkan pertama kali pada Konferensi Internasional PBB di Mar de Plata, Argentina, pada 1977.

yang cukup tinggi untuk mendapatkan dan melestarikan air baku. Sayangnya, air baku yang didapatkan oleh PDAM tetap belum dapat memenuhi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K).

Kedua, ketidaksesuaian pengaturan juga terlihat pada pengendalian daya rusak air, dimana sanitasi luput dari perhatian pembuat kebijakan, sebagai suatu upaya utama untuk melestarikan ketersediaan air. Tidak diaturnya sanitasi dalam RUU SDA akan berakibat fatal, salah satunya bagi PDAM.

Dengan tidak diaturnya sanitasi dapat mengakibatkan kualitas air baku yang diterima PDAM berada pada kualitas yang sudah tidak layak diolah menjadi

air minum. Hal ini menyebabkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengolah air baku yang kotor menjadi air minum.

Tingginya biaya produksi air minum akan berakibat pada tingginya tarif air minum yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Sebagai contoh, biaya produksi air minum di DKI Jakarta meningkat dari Rp.8,000 per m³ pada 2005 (Bakker, 2005) menjadi Rp.12,000 per m³ pada 2015 karena PDAM harus mengolah air limbah yang belum diolah menjadi air minum (Nasution, 2015).

Ketiga, ada ketidaksesuaian antara prinsip air sebagai benda

publik dan benda ekonomi juga terlihat ketika air kemasan dimasukkan menjadi salah satu kategori sumber air minum. Padahal, air kemasan oleh para penggiat air minum di Indonesia dan juga negara-negara maju dunia dikategorikan sebagai *beverages* atau produk minuman yang dihasilkan dari sebuah industri. Dengan demikian, air kemasan merupakan benda ekonomi karena pengupayaannya ditetapkan melalui mekanisme pasar.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, pembuat kebijakan RUU SDA tentu perlu untuk lebih mengkaji pengaturan air di sisi hilir yaitu ketika air menjadi kebutuhan

pokok/dasar masyarakat untuk minum, masak, mandi, cuci, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tentu perlu dipertimbangkan menyeluruh atau dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam rantai pasok air minum. Pemenuhan 4K air minum tentu tidak akan dapat dipenuhi jika air baku yang berada di hulu rantai pasok air minum juga tidak diupayakan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak airnya. Selain itu, pemenuhan air minum juga akan terkendala jika air limbah sebagai produk akhir dari pemanfaatan air minum tidak diatur seimbang dengan pengaturan air baku dan air minum.



Sungai yang mengalami kekeringan

FOTO:GEOGRAFIUP2010_BLOGSPOT



Dalam 30 menit, IPLT Duri Kosambi Sulap Limbah Menjadi Air Siap Pakai

Setiap daerah mempunyai masalahnya sendiri. Bagi daerah padat penduduk seperti Jakarta, selain menghadapi masalah keterbatasan sumber air, juga dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat besar.

Mengelola limbah rumah tangga bagi daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 10 juta jiwa tentu bukanlah hal mudah. Apalagi, masih banyak permukiman kumuh yang mempunyai sistem sanitasi buruk. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya persoalan persampahan.



ISTIMEWA

Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi guna menyelesaikan tantangan di sektor air minum dan sanitasi. Untuk menjawabnya, salah satu solusi yang dilakukan membangun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Di IPLT Duri Kosambi ini, Perusahaan Daerah Pal Jaya mengadopsi perangkat teknologi bernama Andrich Tech untuk mengolah kotoran warga Jakarta menjadi air bersih hanya dalam waktu 30 menit saja.

Mesin Andrich Tech ini dibuat oleh ilmuwan Andri Oba dan Chairunnas dari PT MJH Lestari Internasional, yang penggunaannya diresmikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 23 Mei 2018 lalu. Alat ini dipandang mampu mengatasi masalah ketersediaan air bersih di Jakarta, dan juga bisa diujicobakan oleh daerah lain yang mengalami hal serupa.

Teknologi Andrich Tech ini hadir melengkapi teknologi konvensional dan mekanis yang sudah lama dipakai di IPLT Duri Kosambi. Sistem konvensional butuh waktu 27 hari, sedangkan

teknologi mekanis hanya mampu mengurangnya pada angka 7 hari.

Andrich Tech dinilai dapat menjadi jawaban atas masalah air dan limbah. Menurut data PD Pal Jaya, setiap hari buangan limbah warga DKI Jakarta mencapai 2 juta meter kubik.

Mengingat kapasitas pengolahan air limbah DKI Jakarta saat ini, setiap harinya hanya mampu mengolah 35 ribu meter kubik di dua tempat yaitu di IPLT Pal Jaya di Pulogebang dan Bukit Duri. Sedangkan untuk pengolahan



“Ya, konsumsi disini tentu tak untuk diminum. Memang, secara kasat mata airnya cukup jernih. Dan benar saja, ketika dicium, tak ada bau sama sekali. Jejak limbah benar-benar hilang.

limbah dengan perpipaan hanya bisa menjangkau 3,8 persen dari total warga DKI.

Meskipun DKI Jakarta memiliki IPAL Waduk Setia Budi yang cukup besar, namun kapasitasnya masih jauh di bawah kebutuhan. IPAL ini berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare di Jalan Galunggung, Setiabudi, yang difokuskan untuk mengolah limbah dari bangunan-bangunan tinggi dan pusat perkantoran di Jakarta Pusat yakni di sekitaran Kuningan, Sudirman dan Senayan. Dengan 7 mesin aerator, limbah diolah di instalasi tersebut.

Proses di IPLT Duri Kosambi dimulai saat truk pengangkut tinja masuk ke lokasi IPLT. Dari truk,

tinja lalu disalurkan melalui sebuah pipa menuju tangki penampungan yang cukup besar.

Limbah itu lalu dipisahkan secara otomatis oleh mesin Andrich Tech ke dalam dua kelompok yakni limbah padat dan limbah cair. Selanjutnya, dilakukan proses pengendapan dengan mencampurkan takaran bahan kimia untuk memisahkan ampas dan air.

Air yang sudah tak berampas dialirkan melalui pipa ke sejumlah tangki berwarna hijau, dengan berbagai ukuran dan fungsi. Tak menunggu lama, hanya 30 menit saja, air itu sudah dialirkan ke pipa terakhir untuk bisa digunakan.

Secara kasat mata air yang dihasilkan cukup jernih dan tidak berbau.

“Ya, memang tidak berbau karena sudah dinetralkan dengan bahan kimia tadi, dan melewati beberapa proses penyaringan di mesin ini,” kata Andry, staf Andrich Tech ditemui PERCIK.

Meski tak berbau dan terlihat jernih, jangan mencoba meminumnya. Karena selain terkesan jorok, pihak IPLT Duri Kosambi juga tak mengizinkan.

“Kalau untuk diminum, tentunya harus ada lagi *water-treatment* yang memenuhi standar higienis. Pipanya harus yang bersih dan dilengkapi mesin regulator untuk memastikannya benar-benar bersih dan bisa diminum,” sambung Andry.

Lalu untuk apa air ini? Hasil pengolahan ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan yang tak berhubungan dengan tubuh manusia secara



saja p. Kalau untuk tanaman saja, sudah cukup jika dari kadar kelayakannya,” sambungnya.

Saat ini masih banyak yang harus diselesaikan untuk mengelola air limbah Jakarta. Hingga tahun 2035 nanti ditargetkan sudah terbangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu atau Jakarta Sewerage System (JSS) di 15 zona. Ke-15 zona ini diharapkan bisa mengatasi 90% limbah warga Jakarta saja.

langsung. Misalnya menyiram tanaman, mengairi sawah dan macam-macam aktivitas Dinas Kebersihan lainnya.

“Ini untuk menyiram tanaman

Solusi yang ditunjukkan IPLT Duri Kosambi ini tentu diharapkan bisa diadopsi oleh daerah lain. Sehingga semakin banyak limbah yang diolah menjadi air yang siap guna. Solusi ini memberikan

“

Hasil pengolahan ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan lingkungan yang tak berhubungan dengan tubuh manusia secara langsung.

dua manfaat sekaligus, yaitu mengolah limbah dan membuat air yang dapat digunakan kembali.

Adakah daerah lain yang sudah mencobanya?

Bonifasius Sedu Beribe





BERBAGAI CARA MASYARAKAT BELANJA AIR UNTUK KEBUTUHAN



FOTO: POKJA AMPL NASIONAL

Setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan air mereka setiap harinya. Ada yang begitu mudah mengakses air, namun banyak juga yang masih kesulitan dan membutuhkan dana tak sedikit.

Banyak orang di berbagai daerah gratis mengakses air minum layak karena tinggal di dekat sumber air. Hanya bermodal tenaga, mereka sudah bisa mengakses air untuk berbagai kebutuhannya sehari-hari.

Ada juga orang yang perlu membuat sumur bor agar bisa mengakses air. Untuk membuat sumur ini mereka harus menyewa tenaga profesional agar bisa menjangkau sumber air bersih di bawah tanah tempat mereka tinggal. Setelah sumur bor dimiliki, setiap harinya mereka hanya butuh menyalakan pompa listrik untuk menyedot air.

Akses pada air bersih di setiap daerah dan lokasi berbeda satu dengan lainnya. Ada yang berlimpah, ada yang serba kekurangan. Bahkan tidak sedikit yang harus berhemat air, karena sumber air memang sangat jauh. Beberapa yang lainnya terbatas musim, dimana air sangat terbatas di musim kemarau.

Bagi yang tinggal di perumahan seperti Sri Idawaty, warga Perumahan Rajeg Gardenia, Rajeg Mulya, Tangerang, Provinsi Banten, ia mengandalkan sumur bor, karena jaringan PDAM belum masuk ke perumahannya.

Sri bersama suami dan anak perempuannya yang masih kecil tinggal di perumahan subsidi pemerintah ini sejak 6 bulan belakangan ini. Bersama mereka juga tinggal dua orang saudaranya. Saat menempati rumah ini, ia sudah mengetahui bahwa perumahan belum ada akses air PDAM.

"Jadi untuk air, kita pakai dari sumur bor. Memang sumurnya sudah disediakan setiap rumah, tapi mesin penyedotnya kita beli sendiri. Kemarin saya beli mesinnya Rp 3 jutaan," ceritanya.

Karena semua kebutuhan air di rumah itu bertumpu pada mesin penyedot ini, maka beban listrik juga otomatis meningkat. Untuk minum, keluarga ini menghabiskan segalon air isi ulang seharga Rp 5 ribu perhari. Satu galon



ini juga dipakai untuk memasak.

“Saya nyuci perlengkapan makan minum si kecil juga pakai air galon, karena air sumur disini menurut saya kurang steril,” katanya.

Selain air minum, ia biasanya mencuci pakaian sebanyak 3 kali seminggu. Jika sudah tiba saatnya mencuci, mesin penyedot air semakin banyak menguras listrik. Sumur bor juga digunakan untuk mencuci piring yang dilakukannya sekitar beberapa kali sehari.

“Saya agak sering mencuci, soalnya alat makan bayi saya tidak digabungin dengan piring makan kita,” sambung Sri.

Dengan kebutuhan air yang cukup tinggi ini, ia merasa beban token listrik yang diisinya setiap hari cukup memberatkan. Ia selalu rutin mengisi pulsa listrik Rp20 ribu tiap hari. Ya, wajar jika dibebankan dengan semua barang-barang elektronik di rumah itu. Termasuk mencuci 3 motor dan menyiram tanaman.

Sebulan, Sri menghabiskan uang Rp 200 ribu untuk kebutuhan air minum. Sedangkan untuk listrik yang diantaranya digunakan untuk menghidupkan pompa, ia habiskan sekitar Rp 600 ribu per bulan. Angka ini menurutnya cukup besar.

“Listrik di sini Rp 20 ribu

sehari, jadi sebulan Rp 600 ribuan. Sebanyak 40 persen dari biaya listrik itu digunakan untuk menyalakan pompa air,” jabarnya.

Dengan kebutuhan air yang sebesar itu, Sri mengaku cukup kewalahan menyalakan gaji yang diterima suaminya yang bekerja di salah satu pabrik di Tangerang. Suaminya mendapatkan gaji sedikit di atas dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten. Dengan pos untuk kebutuhan air yang cukup besar itu, keluarga ini mengaku cukup kesulitan dalam hal keuangan.

“Berat. Suamiku hanya karyawan pabrik, sedangkan saya tidak

bisa kerja karena punya si kecil," keluhnya.

Namun, persoalan Sri ini belum seberapa jika dibandingkan dengan masalah kekurangan air yang diderita warga Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga Larantuka sudah sejak puluhan tahun lalu menggantungkan masalah air pada sumur bor yang ditimba secara manual. Karena air yang dikelola PDAM Flores Timur yang masuk ke rumah mereka hanya dialiri 2 kali seminggu.

Keadaan inilah yang membuat beberapa pemilik mobil truk dan *pickup* memanfaatkannya sebagai ladang bisnis. Mereka mengambil air di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, untuk dijual. Bama sudah sejak lama menjadi pemasok satu-satunya air yang didistribusikan PDAM ke Kota Larantuka.

Bisnis menjual air bersih ini dirasa cukup menjanjikan, apalagi saat musim kemarau. Diwawancara PERCIK melalui sambungan telpon, Valentinus Suban, yang memiliki sebuah mobil *pickup* pengangkut air mengaku penjualan airnya cukup laris.

"Lumayan laris kalau lagi musim kering begini. Kita pake jeriken 20 liter. Satu jeriken Rp15 ribu," katanya.

Harga tersebut relatif mahal karena warga di kota ini tak banyak yang mempunyai kesanggupan lebih untuk membeli air bersih seperti ini. Tapi, mau tak mau mereka harus

mengusahakannya karena kebutuhan.

"Biasanya setiap hari satu rumah beli 2 jeriken. Kita sekali angkut dari Bama, bawa 20 jeriken," kata Valen.

Usaha jual air minum ini menurut Valen cukup menguntungkan karena mereka membeli di Bama hanya membayar Rp 20 ribu

Larantuka yang berjarak sekitar 21 kilometer. Dalam sehari, mobil yang disupirinya itu bisa bolak-balik 3 kali. Setelah sampai di Larantuka, mereka mulai berjalan menyusuri lorong ke lorong, menjaja air itu.

"Ada yang sudah kenal kita, langsung pesan lewat HP. Tapi kalau yang belum, mereka panggil pas kita lewat," ceritanya.



FOTO: POKJA AMPL NASIONAL

per sekali angkut untuk mobil *pickup*. Sedangkan untuk truk, dikenakan biaya Rp 50 ribu.

"Mereka tidak hitung jeriken. Hitungnya per mobil sekali muat. Uang itu untuk dana kas desa, jadi kita yang jual air juga istilahnya ikut bantu desa juga," sambungnya.

Setelah semua jeriken terisi penuh, mereka lalu menuju

Lalu bagaimana kalau air yang dijajakan mereka tak habis dijual?

"Kita punya langganan tetap yang tiap hari ambil banyak misalnya rumah makan atau salon yang butuh banyak air. Kalau sisa, kita biasanya kasih mereka gratis, supaya mereka besok-besok pesan ke kita lagi," kata Valentinus.

Bonifasius Sedu Beribe

SELAMAT JALAN LORONG 5
KOR. DAMPAKALINGINDE, TERANG
ORW 04 ORT 05



Ancaman Tinja Mengintai Kota



ISTIMEWA

Data penelitian IUWASH Plus 2017 pun tak kalah mengejutkan. Sebanyak 74,4% masyarakat perkotaan diketahui tidak pernah menyedot tangki septik mereka dalam waktu 10 tahun terakhir dan 52% tangki septik di perkotaan terindikasi tidak aman dan sangat berpotensi mencemari lingkungan, terutama air tanah. Maka, tidak heran bila air tanah di kawasan perkotaan dikabarkan berbau dan terindikasi mengandung bakteri berbahaya, seperti e-coli yang berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya diare.



Ancaman air limbah dan tinja ternyata tidak berhenti sampai di situ. Fakta lain menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga di kawasan perkotaan yang tidak mengolah air limbah rumah tangga dengan baik, lebih parahnya mereka tanpa ragu membuang air sisa cucian, dapur, dan kamar mandi langsung ke selokan.

Belum optimalnya infrastruktur sanitasi di wilayah perkotaan, termasuk sarana pembuangan tinja menuntut kita semua harus semakin waspada. Bukan hanya berpotensi mencemari lingkungan, namun tinja juga bisa mengancam kesehatan.

Semua fakta ini tentunya bukan hal yang boleh diperlihora dan dibiarkan begitu saja. Bukan sekadar mencemari lingkungan, kondisi sanitasi buruk terbukti mengancam kesehatan.

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 mencatat, sebanyak 19,73% persen atau sekitar 7 juta rumah tangga yang tinggal di kawasan perkotaan tidak memiliki akses sanitasi layak dan masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Data juga mencatat, baru 1 dari 10 rumah tangga di kawasan perkotaan yang mengelola air limbah mereka secara aman, baik itu dengan penyedotan rutin lumpur tinja atau terhubung dengan sistem air limbah perpipaan.

Aldy Mardikanto dari Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas mengatakan, secara nasional kondisi pengelolaan air limbah kawasan perkotaan di Indonesia sudah cukup baik.

Akses sanitasi layak di perkotaan sudah mencapai 80,3%, artinya 8 dari 10 rumah tangga sudah

ISTIMEWA



mempunyai fasilitas sanitasi layak, hanya saja untuk fasilitas sanitasi ini masih ada beberapa masalah besar.

“Masih banyak rumah tangga yang belum mengelola air limbah dan tinja mereka dengan aman. Bahkan masih ada rumah tangga yang toiletnya tidak mempunyai tangki septik dan mengalirkannya langsung ke badan air (saluran drainase atau pun kali dan sungai),” kata Aldy.

Menurutnya, saat ini di Indonesia telah ada 12 sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, dengan jaringan perpipaan pengumpul air limbah domestik dari rumah-rumah dan kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah.

“Pemerintah juga sedang mempersiapkan 9 sistem baru di 8 kota. Selain itu, sekitar 20 kota juga telah memulai sistem pengelolaan lumpur tinja yang

dilakukan dengan penyedotan lumpur tinja berkala untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja,” tambahnya.

Ditambahkan Aldy bahwa untuk mempercepat perbaikan

kondisi sanitasi di wilayah perkotaan, pemerintah juga tengah membangun sistem setempat dan terpusat melalui dukungan dana APBN dan dana non-pemerintah. Pemerintah juga telah menjalin kolaborasi dengan pihak non-pemerintah





untuk memberikan dukungan teknis dan pendanaan dalam mempercepat perbaikan kondisi sanitasi.

Kendati demikian, semua perbaikan dan perkembangan ini masih dirasa belum cukup, karena perkembangan yang ada tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Diketahui, lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup di kawasan perkotaan, dan diperkirakan akan mengalami lonjakan tajam hingga 66% di tahun 2035 nanti. Dengan itu, tidak terelakkan pembangunan sistem pengolahan sanitasi saja tidaklah cukup, perbaikan kondisi perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah, termasuk tinja.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sarana sanitasi yang baik bukan sekadar hanya melakukan mandi, cuci, dan buang hajat di kamar mandi saja. Tapi mereka juga harus memikirkan pengelolaan air limbah rumah tangga dan tinja mereka.



Perlu diinformasikan bahwa fasilitas jamban atau toliet harus lengkap dengan tangki septik yang kedap, dan harus secara rutin melakukan penyedotan tinja secara berkala. Bila ini semua sudah dilakukan, ancaman tinja pun tidak lagi mengintai. Kota menjadi bersih dan hidup di permukiman sehat bukan lagi sebatas cita-cita belaka.

Di sisi lain, Ika Francisca, BC/ Marketing Advisor, IUWASH Plus, USAID, menerangkan, tantangan sanitasi di perkotaan itu cukup unik, karena tidak hanya ditemui di kawasan permukiman padat, namun juga dijumpai pada kawasan permukiman dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah keatas.

Dengan itu, cara memberikan pemahaman dan sosialisasi sanitasi di perkotaan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara menggurui, tetapi dengan memberikan pemahaman bahwa perilaku sanitasi yang benar merupakan bagian dari gaya hidup sehat dan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita semua.

Dengan memiliki sarana sanitasi yang baik juga secara otomatis kita berperan dalam menjaga kualitas air dan kebersihan lingkungan yang bermanfaat untuk generasi mendatang. Menurut Ika, cara seperti itulah yang biasanya lebih diterima oleh masyarakat di perkotaan.

"Karena warga perkotaan itu mempunyai akses informasi yang lebih luas, maka kita tidak bisa memposisikan mereka sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, jika itu dilakukan otomatis akan ditolak. Cara ampuh ialah dengan mengaitkan sanitasi dengan gaya hidup masa kini. Misal, warga keren itu yang rutin menyedot tangki septik," pungkas Ika.

Saat ini IUWASH juga tengah membantu pemerintah dalam meningkatkan kondisi sanitasi pada sejumlah wilayah perkotaan di beberapa provinsi, salah satunya Kota Malang, Jawa Timur yang kini sebagian kecil warganya sudah tersambung dan terlayani dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Cheerli



Cukup dengan Sampah Siswa Bisa Sekolah dan Kursus Bahasa Inggris



© ស្រីរាជ សុដ័រិកាជ័



Bagi orang kaya yang berkecukupan, dana untuk anak sekolah bukanlah sebuah kendala. Namun bagaimana dengan mereka yang miskin?

Masalah biaya seringkali menjadi penghambat anak untuk sekolah. Fenomena ini terjadi di banyak negara, khususnya di negara berkembang. Biaya yang dikeluarkan semakin besar, apalagi jika siswa harus mengikuti kursus dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Nah untuk membantu para siswa, sebuah sekolah di Kamboja membebaskan biaya sekolah serta

sekaligus membantu anak-anak miskin bisa menikmati pendidikan berkualitas dengan gratis. Para siswa ini membayar biaya sekolah dengan sampah.

Vanday ingin menanamkan budaya pada anak-anak agar memperlakukan sampah dengan baik dan menghargainya. Sehingga, siswa tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat lingkungan kotor dan tidak sehat.

Di Coconut School, selain ada pelajaran umum, siswa juga diajari sejumlah materi ekstrakurikuler,



FOTO-FOTO: COCONUTSCHOOL.ORG

biaya kegiatan ekstrakurikuler, sekolah itu adalah Coconut School yang berlokasi di Taman Nasional Kirirom, sekitar 115 kilometer dari ibu kota Phnom Penh.

Sekolah inspiratif ini didirikan oleh Ouk Vanday, seorang mantan manajer sebuah hotel yang memang bercita-cita membangun Kamboja bebas sampah. Giatnya ia memerangi sampah, sampai mendapatkan julukan 'Si Pria Sampah'.

Sekolah yang baru dibuka satu setengah tahun lalu ini memang bertujuan untuk memerangi sampah,

seperti komputer dan Bahasa Inggris. Di luar sekolah ini, untuk mendapatkan dua pelajaran tersebut, siswa harus mengeluarkan dana, namun di sini gratis.

Banyak anak kurang mampu memanfaatkan Coconut School untuk belajar. Mereka mengaku senang bisa sekolah dan tidak mengemis lagi seperti sebelumnya. Umumnya siswa Coconut School adalah mengemis dan menjadi pemulung yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya.

Roeun Bunthon, salah seorang siswa menceritakan bahwa ia sebelumnya

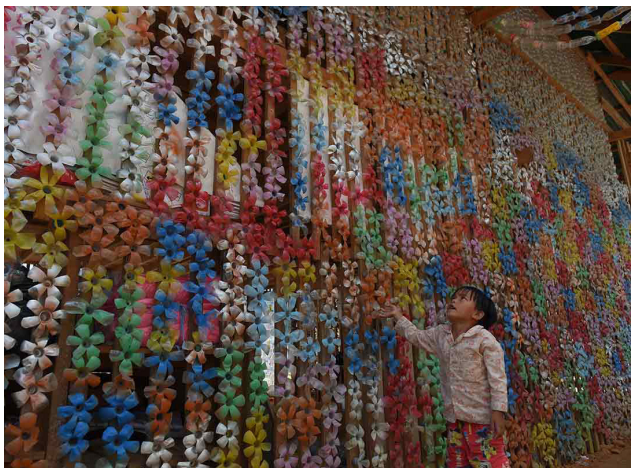


bekerja sebagai pengemis, namun sejak ada Coconut School, ia bisa sekolah kembali. Di sini ia bisa belajar komputer, matematika, dan bahasa. Pelajaran lainnya yang tak kalah penting adalah tentang bagaimana mengurangi limbah di negara mereka yang saat ini masih menjadi masalah.

Bunthon mengaku membayar uang pendaftaran sekolah dengan sekantong tutup botol yang dibuang. Ada sekitar 65 siswa yang terdaftar di sekolah ini. Coconut School berbeda dengan sekolah pada umumnya. Dinding kelas terbuat dari ban mobil yang telah dicat warna-warni. Sementara pintu masuk dihias dengan mural bendera Kamboja yang seluruhnya terbuat dari tutup botol berwarna-warni.

"Saya menggunakan sampah untuk mendidik anak-anak dengan mengubah sampah menjadi ruang kelas. Sehingga anak-anak bisa memahami nilai sampah dengan cara memanfaatkannya," kata Ouk Vandy sebagaimana dilansir dari Taipei Times (13/10/2018).

Pria berusia 34 tahun



ini berencana untuk memperbanyak sekolah model ini di Provinsi Kampong Speu. Bahkan ia ingin ada 200 siswa yang sekolah di Coconut School.

"Kami berharap mereka akan menjadi aktivis baru di Kamboja, memahami penggunaan, manajemen dan daur ulang limbah," kata Vandy.

Sebelum mendirikan 'sekolah sampah' ini Vandy terinspirasi dari banyaknya sampah yang ada di berbagai lokasi wisata di Kamboja yang dikunjunginya. Ia pun berpikir bahwa sampah telah menjadi kendala besar di berbagai negara Asia Tenggara, khususnya Kamboja. Ia melihat kantong plastik dan botol

dilempar sembarangan tanpa pikir panjang sebelumnya. Sampah itu akhirnya berserakan dimana-mana, sampai ke pantai dan lainnya.

Data Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja menyebutkan ada 3,6 juta ton limbah pada tahun 2017. Dari semua sampah yang ada, hanya ada 11 persen yang didaur ulang. Sementara hampir setengahnya dibakar atau dibuang ke sungai dan menyebabkan polusi. Sisanya diangkut ke tempat pembuangan sampah. Sampah yang tak dikelola dengan baik itu bisa menambah dampak perubahan iklim.

Akhirnya, Vandy pun bertekad

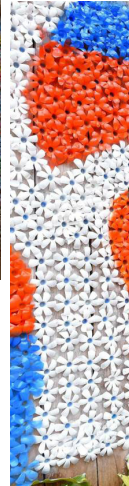
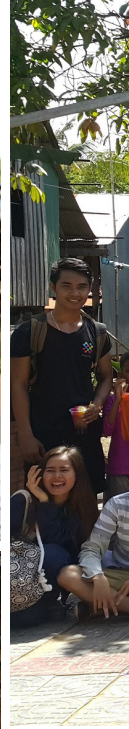




FOTO-FOTO: COCONUTSCHOOL.ORG



“

Coconut School berbeda dengan sekolah pada umumnya. Dinding kelas terbuat dari ban mobil yang telah dicat warna-warni. Sementara pintu masuk dihias dengan mural bendera Kamboja yang seluruhnya terbuat dari tutup botol berwarna-warni.

membuat sekolah ini dengan bantuan sejumlah guru sukarelawan. Mereka bahu membahu mendidik anak-anak untuk peduli dengan sampah dan memberikan berbagai pelajaran yang sebelumnya tidak pernah dinikmati oleh masyarakat miskin di Kamboja.

Di negara ini sebenarnya ada peraturan yang mewajibkan pendidikan publik gratis. Namun untuk pelajaran tambahan seperti Bahasa Inggris, komputer dan lainnya dituntut adanya biaya.

Biaya untuk pelajaran ekstrakurikuler ini bervariasi. Mulai dari 5 Dolar AS per kelas hingga hingga ratusan dolar AS tergantung, tergantung sekolah dan lokasinya.

Inisiatif Vanday untuk mendidkan sekolah berbiaya sampah ini sangat membantu

Kamboja yang masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Dengan sekolah ini Vanday ingin mengubah *mindset* banyak orang yang yakin bahwa selama ini mereka sudah berbuat hal benar, padahal apa yang dilakukannya salah. Termasuk dalam memperlakukan bumi tempat mereka berpijak.

“Dunia menjadi rusak ketika orang memiliki tujuan yang salah. Orang-orang berpikir mereka lebih baik dari hewan karena mereka percaya bahwa mereka lebih pintar. Ya, memang benar bahwa orang lebih pintar dari hewan, tetapi jika kita berpikir dengan cara lain, kita akan mengetahui banyak orang-orang yang kalah dibandingkan dengan hewan. Mengapa? Karena alam tidak dihancurkan oleh hewan, ia dihancurkan oleh manusia,” tulis Vanday dalam situsny coconutschool.org.

Islahuddin



Cleanomic Perangi Sampah Plastik dengan Cara Unik

Indonesia darurat sampah plastik. Setiap tahun Indonesia diperkirakan menyector 4,7-12 juta ton sampah plastik ke laut. Sebagian besar sampah itu berasal dari daratan yang sengaja dibuang dan mengalir ke laut.



Perilaku buang sampah sembarang seakan tidak bisa dibendung. Sementara usaha untuk mendaur ulang pun hanya diminati segelintir orang. Hal ini membuat jumlah sampah semakin menumpuk dan menjadi masalah di lingkungan masyarakat.

Kondisi ini membuat sejumlah pecinta lingkungan terketuk hatinya untuk memberikan solusi. Salah satunya dicontohkan oleh Denia Isetianti Permata yang mencetuskan inisiatif Cleanomic.

Kepada PERCIK ia menceritakan bahwa ini sebenarnya adalah gerakan sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Namun cara sederhana ini bisa berkontribusi mengurangi polusi sampah plastik yang saat ini begitu banyak dibuang sembarang.

Kegelisahan Denia berasal dari banyaknya sampah plastik di rumah sendiri. Setiap belanja, selalu banyak wadah plastik yang digunakan. Mulai dari kantong plastik, hingga kemasan masakan yang sangat beragam.

“Saya tuh suka belanja online. Yang kirim itu kan dari banyak macam vendor. Begitu barangnya datang dari



mana-mana, sampah kantong plastik juga ada dimana-mana,” ceritanya.

Itu bukan terjadi sekali dua kali. Lalu belakangan, ia merasa disentil dengan pemakaian kantong plastiknya yang cukup banyak itu. Saat itu, tren zero waste dari Amerika sudah mulai viral. Dan ia merasa, gerakan ini cukup serius meminimalisir sampah plastik.

Denia yang memang sehari-harinya berjualan aneka produk secara online, memikirkan konsep baru ini bisa ia terapkan.



Tidak hanya ingin mendaur ulang, Denia juga ingin menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. “Saya mulai kepikiran bikin sesuatu,” katanya.

Lalu beberapa barang seperti sikat gigi dari bambu, sedotan dari bambu dan stainless, juga tempat minum, mulai ia perkenalkan. Kebetulan saat itu bertepatan dengan viralnya video laut Nusa Penida di Bali yang penuh sampah plastik, direkam seorang turis asing.

“Saya mulai jualan produk





DENIA ISETIANTI PERMATA
Pencetuskan Gerakan Cleanomic

ramah lingkungan seperti ini mulai pertengahan Maret 2018, sendiri. saat itu belum ada teman-teman yang mengikuti," sambungnya.

la menjual produk-produk tak biasa itu. Sampai satu hari, seorang Instagram *influencer* memesan barang jualannya itu, lalu mengesposnya di akun Instagramnya yang disinggahi banyak sekali pengikut.

"Dari situ banyak banget yang *aware* sama Cleanomic. Hingga akhirnya sekarang kita sudah punya tim untuk kerjakan ini," jelasnya.

Kini, ada sekitar 40 item produk yang dijual di *onlineshop* Cleanomic, yang dipajang di website Cleanomic.net. Di situ ada pensil warna pengganti stabilo, ada *fountainpen* yang tintanya bisa diisi ulang, kotak pensil dari kayu sengan, kantong jaring multi fungsi, *cottonbud* dari bambu, deodoran organik, dan masih banyak lagi.

Salah satunya yang mencolok adalah *menstrualpad* sebagai pengganti pembalut wanita. Semua barang itu ditawarkan mereka dengan ajakan utama yaitu untuk mengurangi sampah plastik.

"Kami hanya mau memberi tahu bahwa isu lingkungan itu isu yang serius. Sampah itu masalah besar dan harus kita semua pikirkan sekarang, sampai generasi mendatang," katanya.

Denia sendiri selain memprakarsai gerakan ini, di rumah ia menerapkannya sebagai kebiasaan rutin. Ia sudah rutin mengkompos sisa makanan. Ia tak membuang sisa makanan ke tempat sampah, karena ia sadar, sampah organik ini penyumbang sekitar 70% sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kompos sisa makanan ini lalu kemudian ditaburkan ke tanaman sebagai pupuk.

Kebiasaan baik lainnya adalah, ia tak mau menggunakan kantong plastik saat menerima barang

belanjaan. Ia sudah membawa sendiri kantong kain yang bisa dipakai berulang kali.

Meski begitu, ia sadar bahwa efek dari kebiasaan yang dilakukannya ini tak seberapa pengaruhnya pada jumlah sampah yang ada saat ini. Apalagi, Cleanomic tidak memproduksi barang yang mereka jual. Mereka hanya membantu para pembeli untuk menemukan barang ramah lingkungan dengan cara reseller.

"Kebanyakan kita ambil dari vendor memang. Karena kita bukan *manufacture*. Kita *e-commerce* yang menjual barang-barang ramah lingkungan, dan mengkampanyekan penggunaan barang-barang ini untuk mengurangi sampah plastik," katanya.

Tapi ia sangat yakin, jika semakin banyak warga yang peduli dengan masalah sampah plastik ini, masalah besar ini lambat laun akan semakin terselesaikan.

Islahuddin

LOKAKARYA PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) selama ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan sanitasi di Indonesia. Program selalu mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dalam berbagai kesempatan juga selalu melakukan lokakarya yang diikuti Pokja tingkat Provinsi



Penguatan Pokja Provinsi

Program Management Unit (PMU) PPSP menggelar Lokakarya Kick-Off Nasional Program PPSP 2018 di Hotel Arya Duta pada 13-14 Maret 2018. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan pokja provinsi agar mencapai target akses universal. Para peserta yang merupakan pengurus Pokja di tingkat Provinsi diberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi tantangan.

Mereka juga mendapatkan pendampingan untuk penyusunan rencana kerja hingga implementasi program.

“Diharapkan acara ini dapat memberikan masukan terhadap pengembangan pembangunan sanitasi ke depan,” kata Kepala PMU PPSP, Laisa Wahanudin. **Cheerli**

Berbagi Informasi Pembangunan Sanitasi

Bappenas menggelar Lokakarya Peran Provinsi dalam Pelaksanaan Program PPSP di Hotel Harris Vertu, Jakarta 15-16 Agustus 2018 lalu.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, selama dua periode RPJMN 2010-2014 dan 2015-2017, ada 21 provinsi yang telah menunjukkan peningkatan akses sanitasi. Sementara 13 provinsi lainnya tidak menunjukkan perkembangan.

Rudy berharap acara lokakarya ini

semua provinsi bisa saling berbagi informasi tentang berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam mempercepat pencapaian target akses universal. Semua daerah diharap bisa memberikan perhatian besar pada peningkatan akses ini.

“Memperbaiki sanitasi tidak hanya soal membangun infrastruktur, tapi juga tentang merubah pola pikir masyarakat,” pungkasnya.

Cheerli



INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2018
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

IDF Dukung Program Pembangunan Indonesia Dari Pinggir

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) kembali menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018. Acara yang mengusung tema “Pathways to Tackle Disparities across the Archipelago ini digelar di Hotel RitzCarlton Kuningan Jakarta, 10-11 Juli 2018.

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, tema yang diusung tahun ini sejalan dengan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan meningkatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di semua wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.

“Berbagai Ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF diharapkan bisa berguna untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan dan menanggulangi permasalahan ketimpangan antar wilayah,” kata Bambang. **Cheerli**

Bappenas: Hunian Layak Merupakan Hak Konstitusi Warga



Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyebut masyarakat berhak tinggal di hunian dan lingkungan yang sehat. Bahkan ini menurutnya merupakan hak konstitusi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28(h).

Hal itu disampaikan Virgiyanti di Lokaltih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Hotel Claro, Makassar, 12-14 September 2018.

“Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas telah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator,” ujarnya.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyediakan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi agar perumahan dan kawasan permukiman sehat dan layak. **Cheerli**

MEMBANGUN KOTA, MEMBANGUN PERADABAN

Seiring berkembangnya dunia yang makin modern, makin banyak kota berubah menjadi lebih baik dan maju.

Semua walikota atau gubernur ingin membuat kotanya paling maju dan modern, serta tentu saja sehat. Namun membuat kota impian itu bukanlah hal mudah, namun bukan hal yang mustahil. Salah satu yang diperlukan untuk mewujudkannya adalah adanya pemimpin berkualitas yang mampu menyakinkan warga, pemerintah daerah hingga legislatif untuk mendukung perubahan positif yang dilakukan.

Pemimpin dan kepemimpinan adalah modal terbesar dalam mengelola kota. Sudah seharusnya seorang pemimpin dapat melihat dan mampu mengoptimalkan sumberdaya di sekitarnya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam ataupun sumber daya pendukung lainnya.

Untuk merubah peradaban kota pemimpin juga harus memiliki kemampuan birokrasi yang baik agar jalinan komunikasi bisa berjalan harmonis dengan legislatif. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tambahan seperti kemampuan teknologi agar bisa menarik dunia usaha.

Saat bicara kota, selalu ada manusia/ warga dan lahan/tempat tinggal, perencanaan fisik yang, termasuk dalam perencanaan fungsi dan teknis harus di kelola secara benar dan berkelanjutan. Maka dari itu, untuk mendukung perkembangan kota, warga dituntut cerdas memilih pemimpin dengan rekam jejak dan visi misi membangun kota berdasarkan kebutuhan, sehingga bisa membuat penduduknya bahagia, aman, dan nyaman.

Pada buku “Membangun Peradaban Kota” ini, penulis menampilkan 50 tulisan yang mengulas tentang semua upaya yang bisa dilakukan dalam membangun peradaban kota, mulai dari menangani masalah banjir, sampah, kendaraan, menata hunian, upaya revitalisasi pasar rakyat hingga perkembangan kota ramah infrastruktur. Dimana, semua tulisan itu bertujuan untuk mewujudkan peradaban baru kota. **Cheerli**



Judul : Membangun Peradaban Kota
Penyusun : Nirwono Joga, Dhaneswara Nirwana Indrajoga
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
Halaman : 52+xi

SAMPAH PLASTIK BUNUH IKAN RAKSASA, PAUS SPERMA

Seekor Paus Sperma (*Physeter macrocephalus*) pada 19 November 2018 lalu ditemukan mati di perairan Desa Kapota, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setelah perutnya dibedah, rupanya banyak sampah plastik di dalamnya.

Dan disimpulkan, bahwa ikan raksasa ini meninggal karena mengonsumsi sampah plastik yang kemudian menumpuk di dalam perut. Ini menunjukkan bahaya plastik tidak hanya membuat lingkungan tercemar, juga mengancam kehidupan makhluk hidup, karena banyak yang mengira plastik yang berserak itu adalah makanan.

Tali rafia
3,26 kg

Botol plastik
150 gr

Gelas plastik
750 gram

Sandal jepit
270 gram

Kantong plastik
260 gram

Plastik keras
140 gram

5,9 kg sampah plastik ditemukan di perut Paus Sperma.